

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI SWASTA DI JAWA TENGAH

Hadi Sasana

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro  
email:hadisasana@yahoo.com

## ABSTRACT

*Investment very significant influence economic growth, this research aim to identify and analyse factors influencing private investment in Central Java Province. Analyse use multiple regression model with Ordinary Least Square method (OLS). Result of analyse indicate that, rate of interest negative influence and significant to private investment in Central Java coefficient  $-1017.464$ . Government expenditure and inflation have positive influence and significant to private investment in Central Java coefficient  $243.715$  and  $0.19$ .*

**Keywords:** private investment, rate of interest, government expenditure and inflation

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan di seluruh tanah air dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas sejak tahun 2001 perlu disikapi dengan cepat oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Kewenangan yang lebih luas dalam desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut aspek-aspek administrasi, kelembagaan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan harus segera direalisasikan termasuk pengelolaan sumber penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Jawa Tengah 2003–2008, disebutkan bahwa untuk menjadikan Jawa Tengah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, berkelanjutan, menjadi pilar pembangunan nasional yang dilandasi oleh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, disusun pentahapan pelaksanaan pembangunan Propinsi Jawa Tengah tahun 2004 – 2008, sebagai berikut:

1. Tahap Penguatan Kemandirian (2004 – 2005).
2. Tahap Peningkatan Daya Saing (2006 – 2007).

3. Tahap Pengembangan Kemandirian, Daya Saing dan Eksistensi

Adapun strategi kebijakan di bidang ekonomi yang ditempuh pada peningkatan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta meningkatkan kemandirian dan daya saing dengan memprioritaskan pada sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil menengah dan/atau usaha kecil menengah dan pariwisata. Strategi yang ditempuh adalah (Rencana Strategis Jawa Tengah 2003 – 2008):

1. Memperkuat agribisnis dan agro industri di pedesaan dengan memfasilitasi petani dan *stakeholders* untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, memperluas akses pasar, permodalan serta memperkuat kinerja kelembagaan.
2. Menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah dengan memperkuat jalur Selatan-Selatan dan kawasan tertinggal untuk meningkatkan mobilitas ekonomi di wilayah tersebut, serta pembangunan kawasan-kawasan sentra produksi dengan meningkatkan sinergi jejaring antar kawasan dengan *outlet* regional dan global, maupun antara kawasan sentra dengan *hinterland*-nya.
3. Memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha dan investasi.
4. Meningkatkan daya saing produk UKM di pasar global dengan menerapkan standar produk

internasional, memfasilitasi promosi yang sistematis di dalam dan luar negeri serta membantu pengembangan sistem penjaminan sesuai ketentuan perbankan dan pranata sosial ekonomi.

5. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam struktur ekonomi melalui obyek-obyek wisata yang berbasis ekonomi kerakyatan dan kelestarian lingkungan.

Secara umum kondisi perekonomian di Jawa Tengah sejak tahun 1999 menunjukkan adanya perkembangan yang positif, setelah dalam kurun waktu 1997–1998 dilanda krisis ekonomi yang serius. Berangsur-angsur perekonomian di kabupaten/kota mulai meningkat dan pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota tumbuh positif.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan seperti yang tertuang dalam Renstrada Jawa Tengah diperlukan investasi yang cukup besar terutama dari kalangan swasta. Kegiatan investasi diharapkan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kehadirannya mampu berperan sebagai motor penggerak dan sekaligus menjadi pendorong percepatan (akselerasi) pembangunan secara luas.

Pengalaman negara-negara lain yang perekonomiannya tumbuh dengan pesat menunjukkan bahwa kegiatan investasi sangat signifikan mempengaruhi peningkatan ekspor, devisa negara, pendapatan negara maupun daerah, penyerapan tenaga kerja serta alih teknologi yang kesemuanya itu bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, walaupun terjadi akselerasi investasi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun terdapat berbagai kendala yang menyebabkan investasi (PMA maupun PMDN) dari tahun ke

tahun tidak stabil (berfluktuasi). Perkembangan investasi di Jawa Tengah selama 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut tabel 1.

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa investasi PMA/PMDN di Jawa Tengah selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan nilainya cenderung mengalami penurunan. Penurunan nilai investasi PMA lebih tajam daripada nilai investasi PMDN. Pada tahun 1997 nilai investasi dari PMA adalah sebesar US\$2.221.516.899.19 dan meningkat menjadi US\$3.072.199.262.68 (tahun 1998), namun demikian akibat krisis multidimensional yang melanda di negara kita termasuk di Jawa Tengah, nilai investasi dari PMA menurun sangat drastis (US\$80.018.358.00) pada tahun 2003. Demikian pula nilai investasi PMDN, pada tahun 1997 nilai PMDN di Jawa Tengah sebesar Rp7.406.630.814.479, akibat krisis multidimensional nilai investasi PMDN menurun menjadi sebesar Rp3.607.653.588.597 (tahun 2003). Hal ini sangat mengganggu kegiatan perekonomian di Jawa Tengah apabila tidak diketahui faktor-faktor penyebabnya.

Dengan latar belakang tersebut di atas secara umum permasalahannya adalah adanya kecenderungan penurunan nilai investasi swasta (PMA dan PMDN) di Jawa Tengah. Untuk menganalisis permasalahan tersebut perlu diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal swasta asing maupun penanaman modal dalam negeri di Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta (PMA dan PMDN) di Jawa Tengah. (2) Menganalisis pengaruh tingkat suku bunga, laju inflasi dan pengeluaran pemerintah daerah Jawa Tengah terhadap besarnya investasi di Jawa Tengah.

**Tabel 1.** Perkembangan Investasi Jawa Tengah Tahun 1998 – 2003

Tahun	PMA		PMDN	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi ( US \$ )	Jumlah Proyek	Nilai Investasi ( Rp )
1998	46	3.072.199.262.68	20	2.482.396.427.000
1999	72	127.845.393.55	26	1.308.709.116.573
2000	56	72.072.435.43	34	2.451.203.432.171
2001	57	96.681.990.00	26	2.912.197.970.000
2002	44	91.765.000.00	14	1.541.259.610.000
2003	57	80.018.358.00	21	3.607.653.588.597

Sumber: BPM Propinsi Jawa Tengah, 2004

## LANDASAN TEORI

### 1. Investasi

Perkataan "investasi" merupakan salah satu istilah ekonomi yang selalu digunakan orang awam. Tetapi kerap kali pengertiannya berbeda dengan arti "investasi" dalam teori ekonomi. Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai: pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian (Sadono Sukirno, 2000).

Secara statistik, investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi, dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu: investasi perusahaan-perusahaan swasta, pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal, perubahan dalam inventaris (*inventory*) perusahaan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan pengusaha untuk mewujudkan alat-alat produksi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukannya di masa depan. Hal ini berarti investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh untung di masa depan. Semakin cerah prospek untuk memperoleh keuntungan yang lumayan di masa depan, semakin tinggi investasi yang dilakukannya pada masa kini (Gunawan, 2001).

Dari segi nilai dan proporsinya terhadap pendapatan nasional, investasi perusahaan tidaklah sebesar pengeluaran konsumsi rumah tangga. Namun demikian investasi perusahaan perannya sangatlah penting dibanding konsumsi rumah tangga. Di berbagai negara, terutama di negara-negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi perusahaan adalah sangat "volatile" yaitu selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat besar, dan sebagai sumber penting dari berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian.

Disamping itu kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, mening-

katkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting kegiatan investasi dalam perekonomian. *Pertama*, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. *Kedua*, penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional serta kesempatan kerja. *Ketiga*, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, perkembangan ini akan memberi sumbangan penting terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat.

### 2. Tingkat suku bunga

Permintaan efektif ditentukan oleh hasrat konsumsi dan dorongan untuk mengadakan investasi. Hasrat konsumsi tergantung dua faktor yaitu: besarnya pendapatan dan bagian yang dibelanjakan untuk barang-barang konsumsi. Investasi akan cenderung untuk naik apabila tingkat bunga mengalami penurunan maupun karena kenaikan marginal efisiensi kapital. Sehingga jumlah investasi atau permintaan efektif untuk investasi tergantung pada dua faktor yaitu: *marginal efficiency of capital (MEC)* dan *rate of interest* atau tingkat bunga (Nopirin, 1993).

*Marginal Efficiency of Capital (MEC)* menggambarkan tingkat pendapatan (*rate of return*) dari investasi baru yang diharapkan akan dilakukan. Apabila MEC lebih besar daripada tingkat bunga pasar, maka pengusaha akan melakukan investasi, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian diperoleh hubungan antara tingkat bunga dengan pengeluaran investasi, bahwa semakin rendah tingkat bunga maka makin besar pengeluaran investasi.

Menurut Manulang (1993), hasrat konsumsi adalah relatif stabil, tidak demikian halnya dengan investasi. Dorongan untuk mengadakan investasi tergantung kepada keuntungan yang diharapkan dari penanaman modal tersebut. Sudah barang tentu bahwa harapan keuntungan yang dapat di dasarkan atas penaksiran yang tidak pasti, karena itulah mengapa investasi mengalami fluktuasi. Apabila harapan untuk memperoleh keuntungan tidak ada,

investasipun akan berkurang. Itulah sebabnya mengapa dikatakan bahwa dorongan untuk mengadakan investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan dari investasi baru dan besarnya tingkat bunga.

Menurut Keynes, bunga adalah semata-mata gejala moneter, bunga adalah pembayaran untuk menggunakan uang. Berdasarkan atas pendapat yang demikian mengapa Keynes yakin bahwa akan pengaruh uang terhadap sistem ekonomi seluruhnya. Tingkat bunga memiliki fungsi alokatif dalam perekonomian, khususnya dalam penggunaan uang dan modal. Tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang. Tingkat bunga akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi investasi (Mankiw, 2000).

### 3. Laju inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Masalah kenaikan harga-harga yang berlaku diakibatkan oleh banyak faktor, pada umumnya inflasi berasal dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut:

1. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya para pengusaha akan mencoba menahan barangnya dan menjual kepada pembeli yang bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi. Kedua-dua kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga.
2. Para pekerja di berbagai kegiatan ekonomi yang menuntut kenaikan upah. Apabila pengusaha mulai menghadapi kesulitan dalam mencari tambahan pekerja untuk menambah produksinya, para pekerja akan terdorong untuk menuntut kenaikan upah. Apabila tuntutan kenaikan upah berlaku secara meluas, akan terjadi kenaikan biaya produksi dari berbagai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian.

Disamping itu inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari: (1) kenaikan harga-harga barang yang diimpor, (2) penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh penambahan produksi dan penawaran barang, dan (3) kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab.

Inflasi dapat mempengaruhi kegiatan investasi, hal ini dapat dilihat dari pengaruh inflasi terhadap pengangguran. AW. Phillips pada tahun 1958 dalam tulisannya yang berjudul "*the relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in United Kingdom*" dari studi lapangan tentang hubungan antara kenaikan upah dengan pengangguran di Inggris. Hasil kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Apabila tingkat pengangguran rendah maka tingkat kenaikan upah tinggi dan sebaliknya. (Sadono Sukirno, 2000).

### 4. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah disini adalah meliputi semua pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan roda perekonomian agar berjalan lebih baik dan bersemangat. Peran pemerintah seperti dikemukakan oleh Keynes sering kali diperlukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Untuk menjalankan sektor yang tidak dilakukan oleh sektor swasta seperti memproduksi barang publik. Memproduksi barang publik tentu memerlukan dana yang terwujud dalam pengeluaran pemerintah baik level nasional maupun daerah.

Pengeluaran pemerintah disini tidak dibedakan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, meski pengeluaran pembangunan yang memiliki pengaruh terdekat dengan investasi. Namun secara umum pengeluaran pemerintah haruslah dilihat secara utuh sehingga pengaruh atau timbal balik pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian dapat terlihat. Keynes mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah diperlukan untuk mendorong meningkatnya pengeluaran agregat di saat daya beli masyarakat menurun dan lesu. Pengeluaran pemerintah dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi seperti biasanya (Kuncoro, 2000).

Efek *crowding out* dari pengeluaran pemerintah dapat terjadi apabila sektor swasta dan pemerintah saling bersaing dan tumpang tindih dalam melakukan peranannya dalam perekonomian. Namun *crowding out* lebih terjadi pada pasar obligasi dan tidak terjadi pada sektor investasi riil yang manfaatnya lebih terasa dalam masyarakat. Oleh karena itu *crowding out* tidak begitu diperhitungkan dalam penelitian ini. Pengeluaran pemerintah lebih mendapatkan peran sebagai pendorong/stimulus bagi kegiatan perekonomian di suatu daerah dimana pengeluaran pemerintah memberi dukungan terhadap sektor swasta dalam meningkatkan perekonomian daerah terutama untuk meningkatkan investasi.

## METODE PENELITIAN

### 1. Data dan lingkup penelitian

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan para responden (investor, Pemda) maupun melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dengan aparat/pejabat terkait. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang diperlukan, bersumber dari Badan Pusat Statistik, BKPM Jawa Tengah, Deperindag, Bank Indonesia maupun dinas/instansi terkait, serta didukung dengan bahan kepustakaan yang relevan.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Secara substansi investasi swasta dalam penelitian ini meliputi PMA dan PMDN. Periode penelitian meliputi kurun waktu tahun 1986 sampai dengan tahun 2002.

### 2. Definisi operasional

- Investasi swasta, diperoleh melalui penjumlahan (total) realisasi investasi PMDN dan PMA di Jawa Tengah dengan satuan rupiah
- Tingkat bunga, merupakan tingkat bunga riil dalam satuan persen
- Inflasi, kenaikan harga-harga barang secara umum, dalam satuan persen
- Pengeluaran pemerintah, pengeluaran pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi Jawa Tengah dengan satuan rupiah.

### 3. Alat analisis

Analisis menggunakan model regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*, untuk mengetahui besarnya perubahan variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 1997).

Model yang digunakan untuk menduga parameter-parameter dari investasi diformulasikan sebagai berikut.

$$IS = \delta + \delta SB + \delta In + \delta PP + U \quad (1)$$

Di mana:

- IS : Nilai Investasi
- SB : Tingkat Suku bunga
- In : Tingkat inflasi
- PP : Pengeluaran pemerintah
- U : Error terms

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang dihadapi hampir semua negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan adalah minimnya biaya yang tersedia untuk menunjang proses pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial ekonominya. Selama ini usaha yang dilakukan oleh pemerintah negara sedang berkembang untuk mendanai pembangunannya antara lain melalui pemungutan pajak, menciptakan uang dalam negeri, tabungan pemerintah, melakukan pinjaman luar negeri serta mengundang investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam suatu perekonomian, penanaman modal atau investasi sangat diperlukan untuk menunjang baik pertumbuhan ekonomi maupun kesempatan kerja. Oleh karena itu upaya untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Jawa Tengah secara intensif selalu dilaksanakan oleh pemerintah.

Pada tahun 1998 sampai dengan 2002 terlihat bahwa perkembangan investasi swasta di Jawa Tengah mengalami penurunan yang sangat tajam setelah mencapai angka yang paling tinggi di tahun 1998 yaitu sebesar Rp27,14 triliun rupiah dan mengalami penurunan drastis menjadi sebesar Rp1,95 triliun pada tahun 1999. Pada tahun 2000 sampai dengan 2002 dimana perekonomian pada tahap *recovery* investasi mengalami kenaikan setiap

tahunnya. Pada tahun 2000 kenaikan investasi swasta sebesar 61,4 persen (Rp3,142 triliun) dan tahun berikutnya yaitu pada tahun 2001 investasi naik menjadi Rp4,2 triliun. Pada tahun 2002 investasi mengalami penurunan kembali menjadi 2,4 triliun. Investasi yang terjadi di Jawa Tengah pada kurun waktu 1986 sampai dengan 2002 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Perkembangan Investasi Jawa Tengah Tahun 1986 – 2002 (Juta Rupiah)

Tahun	Realisasi Investasi di Jawa Tengah	Tahun	Realisasi
1986	321,48	1995	7.176,45
1987	640,03	1996	11.168,13
1988	917,46	1997	15.974,21
1989	3.989,96	1998	27.136,80
1990	5.925,25	1999	1.946,89
1991	3.894,66	2000	3.142,74
1992	1.594,84	2001	4.216,71
1993	2.873,73	2002	2.361,64
1994	9.793,34		

Sumber: BPS Jawa Tengah, 1988-2003

Nilai investasi di Jawa Tengah pada tahun 1998 sampai dengan 2002 memiliki *gap* yang sangat besar, terlebih bila dibandingkan angka tahun 1998 dan 1999. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 1997 sebagai penyebab utama perbedaan angka yang sangat besar pada total investasi swasta di Jawa Tengah pada tahun 1998 dan 1999. Pada tahun 1998 jumlah penanaman modal asing yang masuk ke Jawa Tengah cukup besar jumlahnya yaitu sebesar 3.072.199,26 ribu US\$, dan mulai tahun 1999 akibat krisis ekonomi nasional telah memberikan pengaruh terhadap jumlah penanaman modal asing yang masuk ke Jawa Tengah. Pada tahun 1999 jumlah PMA turun menjadi sebesar 127.915,63 ribu US\$. Perkem-

bangan PMA di Jawa Tengah pada tahun 2000 mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 72.072,43 ribu US\$. Namun pada tahun 2001 dan 2002 nilai PMA mengalami peningkatan yaitu menjadi 96.681,99 ribu US\$ dan 91.765,00 ribu US\$.

Perkembangan investasi dalam negeri (PMDN) di Jawa Tengah memiliki ketahanan yang lebih baik dari pada PMA dalam menghadapi krisis ekonomi nasional. Pada tahun 1999 terjadi penurunan nilai PMDN sebesar 58 persen, namun pada tahun 2000 dan 2001 nilai PMDN yang masuk Jawa Tengah mengalami peningkatan terutama pada tahun 2000 yaitu peningkatan sebesar 135 persen. Pada tahun 2002 nilai PMDN mengalami penurunan sebesar 52 persen menjadi sebesar Rp1,6 triliun.

Perilaku PMDN dan PMA seperti di atas membuat nilai total investasi swasta di Jawa Tengah menjadi fluktuatif dan tidak stabil. Berikut ini disajikan perkembangan PMA dan PMDN di Jawa Tengah 1998-2002.

Penurunan nilai investasi swasta di Jawa Tengah pada tahun 1998 yaitu dari Rp27,1 triliun menjadi Rp1,9 triliun pada tahun 1999 disebabkan oleh banyak hal, antara lain yaitu:

- Nilai PMA pada tahun 1999 mengalami penurunan sebesar 95,8 persen, sehingga total penerimaan investasi swasta yang merupakan penjumlahan PMA dan PMDN pada tahun 1999 menjadi berkurang.
- Nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah pada tahun 1998 ke 1999 juga mengalami penurunan dari Rp8.025,00 menjadi Rp7.100,00 sehingga nilai PMA dalam rupiah menjadi berkurang dibanding tahun 1998.
- Nilai PMDN pada tahun 1999 juga mengalami penurunan sebesar 58,1 persen sehingga total

**Tabel 3.** Perkembangan PMA dan PMDN di Jawa Tengah Tahun 1998 – 2002

Tahun	PMA (Ribu Rp)	PMDN (Ribu Rp)	Total investasi (Ribu Rp)
1998	24.654.399.061,50	2.482.396.430,00	27.136.795.491,50
1999	908.200.973,00	1.038.689.120,00	1.946.890.093,00
2000	691.534.965,85	2.451.203.420,00	3.142.738.385,85
2001	1.005.492.696,00	3.211.218.970,00	4.216.711.666,00
2002	820.379.100,00	1.541.259.600,00	2.361.638.700,00

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2003

penerimaan investasi swasta menjadi berkurang pula. Penurunan baik pada PMA dan PMDN pada tahun 1999 menyebabkan nilai investasi swasta pada tahun 1999 menjadi jauh lebih sedikit dibanding investasi swasta tahun 1998.

- d. Jumlah PMA yang masuk ke Jawa Tengah pada tahun 1998 cukup besar yaitu sebesar 3.072.199,26 ribu US\$, sehingga nilai investasi swasta pada tahun 1998 cukup besar dan jumlah itu merupakan jumlah PMA tertinggi sepanjang tahun 1986 sampai dengan 2002 .

Hal-hal di atas menyebabkan nilai investasi swasta pada tahun 1999 sampai dengan 2002 memiliki nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi tahun 1998.

Kegiatan investasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan/perubahan tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga merupakan *investment cost* bagi para investor. Tingkat suku bunga pada bank-bank di Jawa Tengah pada kurun waktu 1995 - 2003 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.** Tingkat Suku Bunga di Jawa Tengah Tahun 1986 - 2002 (Persen)

Tahun	Tingkat suku bunga	Tahun	Tingkat suku bunga
1986	16,00	1995	15,04
1987	19,00	1996	16,69
1988	19,50	1997	16,28
1989	18,00	1998	21,84
1990	17,75	1999	27,60
1991	21,18	2000	12,17
1992	21,13	2001	13,16
1993	16,25	2002	13,55
1994	12,99		

Sumber: BPS, diolah

Selain tingkat suku bunga investasi juga dipengaruhi oleh laju inflasi. Stabilitas harga akan berpengaruh terhadap perkembangan nilai investasi di suatu wilayah. AW. Phillips pada tahun 1958 dalam tulisannya yang berjudul "*the relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in United Kingdom*" menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Apabila tingkat pengangguran rendah maka tingkat kenaikan upah tinggi dan sebaliknya (Sadono Sukirno, 2000). Dalam studi selanjutnya diteliti bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan

pengangguran. Perkembangan *inflation rate* di Jawa Tengah pada kurun waktu 1988 - 2002 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.** Tingkat Inflasi di Jawa Tengah Tahun 1986 - 2002

Tahun	Inflasi	Tahun	Inflasi
1986	9,73	1995	8,45
1987	9,59	1996	4,37
1988	5,3	1997	10,88
1989	4,83	1998	67,19
1990	3,89	1999	1,51
1991	3,97	2000	8,73
1992	4,34	2001	13,98
1993	9,37	2002	13,56
1994	6,5		

Sumber: BPS, Jawa Tengah

Pengeluaran pemerintah diperlukan untuk mendorong meningkatnya pengeluaran agregat di saat daya beli masyarakat menurun dan lesu. Pengeluaran pemerintah dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi seperti biasanya (Kuncoro, 2000). Berikut ini adalah data mengenai pengeluaran pemerintah dari pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang berasal dari APBD.

**Tabel 6.** Pengeluaran Pemerintah Jawa Tengah Tahun 1986-2002 (Juta Rupiah)

Tahun	Peng. Pemerintah	Tahun	Peng. Pemerintah
1986	13136,26	1995	48894,03
1987	15248,75	1996	54888,36
1988	18151,81	1997	64946,43
1989	20577,35	1998	92635,22
1990	23590,28	1999	108609,19
1991	27972,44	2000	127999,88
1992	32262,68	2001	168570,14
1993	36078,90	2002	202353,58
1994	41503,56		

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka

### Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Jawa Tengah

Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (OLS) dari analisis linier berganda, hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.** Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Jawa Tengah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	14491,144	4060,224		3,569	,003
	SB	-1017,464	232,262	-,438	-4,381	,001
	In	243,715	62,262	,397	3,914	,002
	PP	,190	,026	,743	7,178	,000

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,936 <sup>3</sup>	,877	,849	3564,57213	1,576

- a. Predictors: (Constant), PP, SB, IN  
 b. Dependent Variable: IS

*R square adjusted* bernilai 0,849 yang artinya variabel independen dalam model persamaan regresi setelah diadakan penyesuaian dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 84,9% dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar persamaan. Hal ini dapat diartikan bahwa suku bunga, inflasi dan pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan dengan kekuatan 84,9% terhadap investasi swasta yang ada di Jawa Tengah.

Uji t-statistik atau uji variabel secara individu juga menunjukkan bahwa suku bunga, inflasi dan pengeluaran pemerintah secara berturut-turut memiliki nilai signifikan di bawah  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti setiap variabel secara individu memiliki tingkat signifikansi yang tinggi, sehingga model persamaan garis regresi tersebut dapat terbentuk sebagai berikut:

$$IS = 14491,144 - 1017,464 SB + 243,715 In + 0,190 PP + u \quad (2)$$

Dari hasil estimasi didapatkan bahwa tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan investasi swasta di Jawa Tengah. Tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap investasi swasta di Jawa Tengah sebesar -1017,464. Hal ini memiliki makna bahwa untuk mendukung perkembangan investasi di Jawa Tengah maka tingkat suku bunga yang stabil dan rendah sangat diperlukan dan harus diusahakan oleh pemerintah. Karena penurunan tingkat bunga sebesar satu persen akan

meningkatkan investasi swasta sebesar 1017,464 satuan.

Sementara itu tingkat inflasi memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap investasi swasta di Jawa Tengah. Hal ini bisa dimaknai bahwa perkembangan investasi swasta di daerah Jawa Tengah seiring dengan perkembangan inflasi di daerah ini. Para investor di Jawa Tengah merespon secara positif atas perkembangan harga dengan meningkatkan nilai investasinya. Peningkatan inflasi sebesar satu persen akan meningkatkan investasi swasta sebesar 243,715 satuan. Meskipun kadangkala inflasi nasional memiliki pengaruh yang negatif terhadap investasi swasta nasional, namun untuk investasi swasta suatu daerah hasil dapat saja berbeda karena perilaku investasi di daerah berbeda dengan investasi pada tingkat nasional.

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan investasi swasta di Jawa Tengah. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif sebesar 0,19. Hal ini bermakna bahwa pengeluaran pemerintah sebesar satu satuan akan meningkatkan investasi swasta sebesar 0,19 satuan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus melakukan kontribusinya melalui pengeluaran pemerintah, khususnya pengeluaran pembangunan agar pembangunan di daerah dapat meningkat ke taraf yang lebih maju dan modern sehingga dapat menarik minat investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dalam perkembangannya, investasi swasta di Jawa Tengah pada tahun 1986 sampai dengan 2002 banyak faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan, yaitu tingkat bunga, laju inflasi dan pengeluaran pemerintah. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan investasi swasta di Jawa Tengah. Tingkat inflasi memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap investasi swasta di Jawa Tengah. Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan investasi swasta di Jawa Tengah.

### Saran

Melalui kebijakan fiskal pemerintah daerah Jawa Tengah seharusnya mengalokasikan pengeluaran pembangunan untuk proyek-proyek yang mempunyai dampak positif terhadap perkembangan investasi. Alokasi anggaran di bidang infrastruktur, khususnya di bidang transportasi dan sarana publik lainnya perlu ditingkatkan sehingga dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Pembangunan jalan tol

Semarang-Solo adalah kebijakan yang sangat menunjang perekonomian Jawa Tengah pada umumnya dan hal ini adalah langkah yang sangat baik bagi pemerintah untuk mendorong laju perekonomian daerah. Melalui kebijakan moneter pemerintah diharapkan bisa menjaga stabilitas harga dan tingkat bunga pada tingkat yang rendah serta stabil, sehingga bisa menjadi insentif bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah

### DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Sumodiningrat, 2001, *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi*, Jakarta: Perpod.
- Gujarati, Damodar, 1997, *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Erlangga
- Mudrajat Kuncoro, 2000, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mankiw, N., Geegory, 2000, *Macroeconomics*, Fourth Edition, New York: Worth Publishers, Inc.
- Manulang, 1993, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada
- Nopirin, 1993, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada
- Sadono Sukirno, 2000, *Makro Ekonomi Modern.*, Jakarta: Rajawali Pers.

